



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program

Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No.3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2021

Skripsi

Oleh

Katya Putri Utami

6071801016

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No.3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2021**

Skripsi

Oleh

Katya Putri Utami

6071801016

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Katya Putri Utami
Nomor Pokok : 6071801016
Judul : Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2021

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 23 Juni 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.

: 
6 Juli 2022

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

: 

Anggota

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

: 
6 Juli 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Katya Putri Utami

NPM : 6071801016

Jurusan/Program Studi : Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2021

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juni 2022



Katya Putri Utami

ABSTRAK

Nama : Katya Putri Utami
NPM : 6071801016
Judul : Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi kinerja dalam skripsi ini menggunakan teori kinerja dalam LPPD yang dilatarbelakangi oleh Teori *Performance Measurement* atau *Logic Model*. Pengaplikasian LPPD tersebut didasarkan oleh elemen capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini difokuskan dalam setiap indikator dari masing-masing capaian urusan pemerintahan untuk memperoleh data secara mendalam.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif berdasarkan analisis dokumen dengan teknik pengumpulan data: (1) studi dokumen sebagai sumber utama, (2) wawancara, serta (3) observasi. Studi dokumen terdiri dari dokumen yang berhubungan dengan kinerja seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dan 2021 sebagai dokumen utama, Peraturan Menteri, Manual LPPD, dan dokumen lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sudah memiliki kinerja yang baik dengan menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan tercapainya pembangunan nasional, dapat menghasilkan kebijakan, program, dan inovasi pelayanan publik yang baik, mencapai visi dan misi prioritas Jawa Barat, serta efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Hal tersebut juga didukung berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri dimana Jawa Barat yang selalu masuk kedalam tiga besar Provinsi terbaik dalam taraf nasional.

Kata kunci: *Kinerja, Capaian, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)*

ABSTRACT

Name : Katya Putri Utami
NPM : 6071801016
Title : *Evaluation of Local Governance System in West Java Province in 2020 and 2021*

This study aims to evaluate the local governance system in West Java Province in 2020 and 2021 following Regulation of Government Number 13 of 2019 on Report and Evaluation of Local Governance System. Performance evaluation in this study used performance theory in LPPD which is motivated by the Performance Measurement Theory or Logic Model. The application of LPPD is based on the element of achievement of regional government administration in assessing the performance of the Regional Government. This study is focused on every indicator of each government affairs to obtain in depth data.

The method used in this research is a qualitative method based on document analysis with the following techniques: (1) document study as the main source, (2) interviews, and (3) observation. The document study consists of documents related to performance such as the Report of Local Governance System (LPPD) in West Java Province in 2020 and 2021 as the main document, Ministerial Regulation, LPPD Manuals, and other documents.

The findings of this research show that the Province of West Java in 2021 has a good performance by showing a significant increase in performance compared to the previous year. These results indicate the achievement of national development, can produce good public service policies, programs, and innovations, achieve the vision and mission of West Java priorities, as well efficiency in using resources. This is also supported based on the results of the evaluation of the Ministry of Home Affairs where West Java is always included in the top three best provinces at the national level.

Keywords: Performance, Achievement, Local Government System Report (LPPD)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan sidang ini dengan judul “**Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2021**”. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi, dan ilmu yang didapatkan selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Indraswari., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto., S.IP., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga kesabaran dalam membina saya hingga akhir.
5. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staff Administrasi UNPAR yang telah banyak membantu saya dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Kepala Biro, Kepala bagian serta seluruh jajaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang sudah membimbing dan membantu saya di lapangan.

7. Orang tua saya Bapak Eddy Agus Basuki dan Ibu Eka Nurseha, beserta Kakak-kakak saya Annisa Puji Miranda dan Faisal Libran yang selalu mendoakan, mendukung, dan memohon kelancaran perkuliahan saya.
8. Teman seperjuangan skripsi Shifa, Valdisa, Lidya, Dilla, dan Boy yang selalu membantu dan mendengarkan segala keluhan selama pengerjaan skripsi.
9. Teman-teman SMA saya Silmi, Guswita, dan Putez yang selalu menemani dan menghibur saya.
10. Rufia, Putri, Gita, Vira, Elizabeth, Trecia, Mezara, Ecclesia, Niqa, Xena, Khansa, dan Jacqueline yang sudah membantu dan memberi saya semangat selama perkuliahan.
11. Dan terakhir, terimakasih untuk diri sendiri sudah dapat bertahan selama ini dan terimakasih atas segala perjuangannya.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan besar hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Pertanyaan Penelitian.....	10
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.7. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Evaluasi.....	16
2.3. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).....	18
2.4. Kinerja Organisasi	19
2.5. Teori Pengukuran Kinerja (<i>Performance Measurement</i>).....	23
2.6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	26
2.6.1. Capaian Kinerja Makro.....	27
2.6.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	28
2.6.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	33
2.7. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Metode Penelitian	35
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3. Sumber Data.....	37
3.4. Metode Pengambilan Data.....	38
3.5. Analisis Data.....	40
3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas	44

3.7. Panduan Penyusunan Indikator Analisis Dokumen	46
BAB IV OBJEK PENELITIAN.....	50
4.1. Kebijakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	50
4.2. Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat.....	51
4.3. Target Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat.....	53
4.4. Kondisi Geografis Jawa Barat.....	55
BAB V PEMBAHASAN	58
5.1. Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	59
5.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat...	66
5.2.1. Capaian Kinerja Makro.....	70
5.2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	74
5.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	94
BAB VI KESIMPULAN.....	111
6.1. Kesimpulan	111
6.2. Rekomendasi.....	113
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Sebaran Laporan/Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik	8
Gambar 2. 1. Definisi Kinerja Organisasi	21
Gambar 2. 2. Logic Model	24
Gambar 2. 3. Kerangka Berpikir Penelitian	34
Gambar 3. 1. Teknik Pengumpulan Data	45
Gambar 4. 1. Dasar Hukum LPPD dan EPPD	51
Gambar 4. 2. Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat	56
Gambar 5. 1. Alur Kebijakan LPPD dan EPPD	61
Gambar 5. 2. Peringkat dan Skor Kinerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020	62
Gambar 5. 3 Ringkasan LPPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020	108
Gambar 5. 4 Ringkasan LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Peringkat dan Status Kinerja Provinsi Jawa Barat.....	6
Tabel 2. 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. 2. Kategori Status Kinerja.....	19
Tabel 3. 1. Desain Penelitian Kualitatif	36
Tabel 3. 2. Pengumpulan Data	41
Tabel 3. 3. Reduksi Data	42
Tabel 3. 4. Panduan Penyusunan Indikator Analisis Dokumen	46
Tabel 5. 1. Kategori Skor Kinerja Tahun 2015	65
Tabel 5. 2. Kategori Skor Kinerja Tahun 2020.....	66
Tabel 5. 3. Kategori Penilaian Kinerja.....	69
Tabel 5. 4. Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2020..	70
Tabel 5. 5. Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2021..	71
Tabel 5. 6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	75
Tabel 5. 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	80
Tabel 5. 8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	88
Tabel 5. 9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	91
Tabel 5. 10 Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	95
Tabel 5. 11 Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan narasumber	120
Lampiran 2 Rapat Persiapan Tim Evaluasi Daerah Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten/Kota terkait EPPD Tahun Anggaran 2021.....	121
Lampiran 3 Perundang-undangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara, Indonesia berasaskan kesatuan yang didesentralisasikan menciptakan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengurus (*selfregelen*) dan mengatur (*self besturn*) seluruh urusan pemerintahan berdasarkan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan menjaga integritas negara. Dalam hal ini, pemerintah pusat berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin demokrasi dan keadilan yang bertanggung jawab.¹ Memaksimalkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat tentunya membutuhkan kinerja daerah yang prima, terutama dalam pekerjaan dan penyelenggaraan pelayanan publik karena pelayanan publik tentu menjadi hal yang harus dipenuhi oleh negara demi mencapai tujuan dari pelayanan itu sendiri.

Menurut Priyatno Harsasto (2004), indikator penting bagi keberhasilan pemerintah adalah kinerja, karena kinerja pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Namun juga tidak menutup kemungkinan kinerja dapat memberikan tantangan atau resiko yang besar bagi negara.² Keberhasilan pemerintah melalui penilaian atau pengukuran kinerja

¹ Indah, "Hubungan Wewenang Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" 9, no. 2 (2014): 1–16.

² Priyatno Harsastro, "MANAJEMEN DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN Priyatno Harsasto," *Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Semarang* (2004), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4918>.

dapat dilihat berdasarkan kebijakan yang dibentuk bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pernyataan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau dengan kajian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Agar berjalan sesuai rencana atau target dan dapat menciptakan ruang birokrasi yang baik, maka dibutuhkan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui aktivitas penilaian dan pembinaan yang didasari oleh kebijakan tersebut.³

Salah satu mekanisme pengawasan yang pemerintah pusat laksanakan adalah dengan melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau dengan dilakukan perhitungan sejauh mana kinerja pemerintah daerah dapat menciptakan tata pemerintahan yang berkualitas. Kinerja yang diukur dalam lingkup pemerintah daerah dilakukan agar memperoleh pemenuhan kualitas pengambilan keputusan, akuntabilitas akan nilai keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat selaras dengan tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dengan mengukur kinerja, pemerintah daerah dapat mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selaras dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).⁴

³ Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat 1

⁴ Alayyal Khikmah, "PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 3, no. 1 (2014).

Berbagai produk hukum telah dibentuk agar dapat melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi turunan dari UU Nomor 23 tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum tersebut merupakan revisi dari dasar hukum EPPD sebelumnya yaitu PP No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan sistem analisis kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penilaian kompetensi penyelenggaraan otonomi daerah, serta keutuhan dimensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵ EPPD dilaksanakan oleh Menteri sebagai kegiatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi serta Gubernur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup Kabupaten/Kota. Evaluasi dilakukan dengan menilai akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah berdasarkan informasi yang didapatkan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh Menteri sebagai penanggung jawab atas pemerintahan dalam bagian pendayagunaan aparatur negara dan

⁵ Ari Kuncara Widagdo and Badrul Munir, "Profil Kepala Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 2 (2017).

reformasi birokrasi. EPPD dilakukan setiap tahunnya dengan batas waktu hingga 6 (enam) bulan sejak penyampaian LPPD. Melalui pelaksanaan EPPD, Menteri akan menentukan peringkat dan skor kinerja dari masing-masing pemerintahan daerah dalam lingkup kinerja provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu juga, hasil penilaian kinerja akan menjadi bahan pertimbangan pemberian penghargaan, kesesuaian rencana dan tujuan pembangunan pusat maupun daerah, serta sebagai bahan pembangunan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas.⁶

Pelaksanaan EPPD bersumber dari hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang dilampirkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan capaian kinerja pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Sumber utama bagi data LPPD adalah berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan perangkat daerah, badan pusat statistik, dan instansi lainnya. Menteri dan Gubernur akan melakukan EPPD berdasarkan hasil LPPD yang telah dibentuk sebelumnya.⁷

Dalam revisi EPPD ini, terdapat beberapa perubahan⁸, seperti

1. Bagian dari LPPD mencakup Capaian Akuntabilitas Kinerja Daerah (Akip).

⁶ Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 2, 8, dan 24

⁸ REP-HUMAS JABAR, LPPD 2019, "Pemdaprov Jabar Bantu Kabupaten/Kota Penuhi Indikator Kinerja Kunci", 2020, <https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/36019/2020/01/14/LPPD-2019-Pemdaprov-Jabar-Bantu-KabupatenKota-Penuhi-Indikator-Kinerja-Kunci>

2. Indikator Kinerja Makro mengenai pengangguran, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal
3. LPPD wajib diverifikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah
4. LPPD disampaikan secara daring melalui e-LPPD
5. Hasil e-LPPD dari kementerian disampaikan kembali kepada Pemda
6. Menteri yang mengurus pendayagunaan aparatur negara melakukan evaluasi untuk Lakip
7. Penyediaan sistem informasi elektronik bagi LPPD dan EPPD oleh Kementerian Dalam Negeri
8. Rancangan EPPD yang membahas pengaturan penguatan

Berdasarkan perundang-undangan mengenai peringkat dan status atau hasil penilaian kinerja secara nasional tahun 2015, Jawa Barat dinominasikan menjadi provinsi yang berprestasi tinggi dalam lingkup nasional yang menduduki peringkat ke 2 (dua) dengan skor sebesar 3,1760, dan status sangat tinggi.⁹ Pada tahun 2016, Jawa Barat juga masih berada di peringkat ke-2 dengan hasil perhitungan skor evaluasi sebesar 3,2496 dan dinyatakan memiliki status kinerja yang sangat tinggi.¹⁰ Berdasarkan hasil peringkat dan status kinerja tahun 2017, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 2 dengan skor 3.2842 dari 33 daerah provinsi secara nasional pada tahun 2017.¹¹ Sedangkan tahun 2018, 2019, dan 2020 tidak terdapat nilai

⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015

¹⁰ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional

¹¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional tahun 2017

EPPD dikarenakan pada tahun tersebut Kemendagri tidak mengeluarkan Kepmendagri. Maka dari itu tidak terdapat peringkat dan skor kinerja Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

Seluruh hasil peringkat dan status kinerja Provinsi dalam lingkup Nasional dan dirilis oleh Kemendagri merupakan hasil penilaian terhadap LPPD di masing-masing Provinsi. Pemahaman lebih lanjut mengenai hasil EPPD atau nilai kinerja Provinsi Jawa Barat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Peringkat dan Status Kinerja Provinsi Jawa Barat

Tahun	Peringkat	Skor	Status
2015	2	3,1760	Sangat Tinggi
2016	2	3,2496	Sangat Tinggi
2017	2	3,2842	Sangat Tinggi
2018	-	-	-
2019	-	-	-

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri

Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa, EPPD dapat mendorong Jawa Barat untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih prima sehingga dapat tercipta masyarakat yang sejahtera, aspek pelayanan publik dan aspek daya saing.¹² Pengukuran kinerja melalui EPPD dapat menjaga kontinuitas dan konsistensi, sebab hal ini diharapkan bisa memberikan penjelasan capaian kinerja yang dihasilkan dan mengukur pencapaian reformasi birokrasi. EPPD memberikan ekspektasi untuk meningkatkan reformasi birokrasi di

¹² Bappeda Jabar Humas, "LKPPD Jabar 2018: 20 Kabupaten/Kota Masuk Zona Hijau", diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 8.51, 2019, <http://bappeda.jabarprov.go.id/lkppd-jabar-2018-20-kabupatenkota-masuk-zona-hijau/>

Indonesia terutama Jawa Barat karena EPPD merupakan alat yang digunakan dalam mencapai pelayanan yang prima atau reformasi birokrasi.¹³

Sesuai dengan pendapat Mardiasmo dalam Elga Tri Utama (2020), dengan melakukan pengukuran kinerja atau melaksanakan EPPD diharapkan dapat memperbaiki kinerja pemerintahan untuk dapat mencapai hasil sesuai tujuan dan sasaran, mengalokasikan sumberdaya dan pembuatan keputusan, serta mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan memperbaiki komunikasi.¹⁴ Pelaksanaan evaluasi kinerja dalam birokrasi, diharapkan dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah terutama birokrat agar menjadi lebih terarah serta sistematis. Selain itu juga dapat memberikan tekanan kepada individu di pemerintahan untuk dapat melakukan perubahan ke arah yang positif sehingga dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik atau menghilangkan kesalahan yang terjadi khususnya dalam melaksanakan berbagai urusan.¹⁵

1.2. Identifikasi Masalah

Melalui penjelasan di bab sebelumnya, terdapat permasalahan mengenai hasil pengukuran kinerja melalui EPPD, yaitu

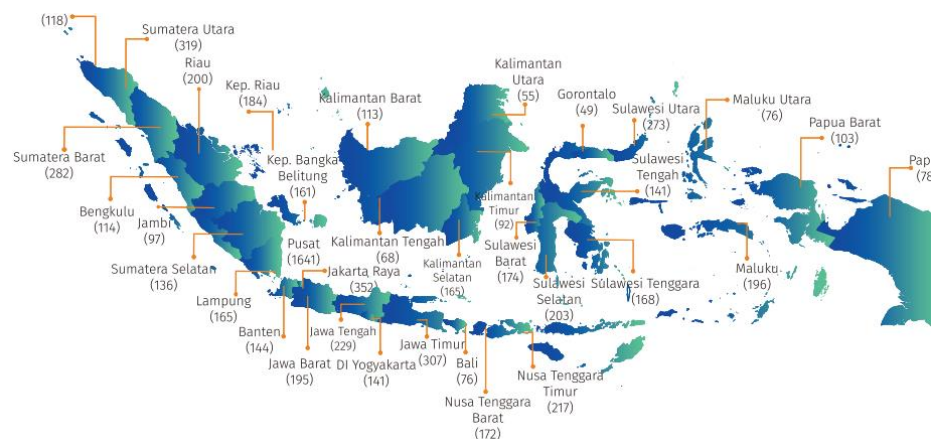
¹³ Suwatin, "Indikator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi: Tinjauan Terhadap Indikator Kinerja Dalam Instrumen Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah," *Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN RI* (2009): 1–12.

¹⁴ Elga Tri Utama, "PENGARUH IMPLEMENTASI EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 5 (2020).

¹⁵ Agus Dwiyanto. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Skor LPPD Jawa Barat dinilai tinggi tetapi masih memiliki kinerja yang buruk yaitu permasalahan birokrasi. Salah satu layanan pengaduan masyarakat yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) mencatat 5.038 laporan pengaduan masyarakat mengenai permasalahan pelayanan yang tidak optimal di Jawa Barat pada tahun 2020.¹⁶ Selain itu, Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, juga mendata dalam ikhtisar kinerja utama laporan tahunan bahwa terdapat 195 keluhan di Jawa Barat per bulannya di tahun 2020.¹⁷ Gambar berikut menunjukkan Provinsi di Indonesia dengan jumlah laporan per bulannya.

Gambar 1. 1 Sebaran Laporan/Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik



Sumber: Laporan Tahunan 2020 Ombudsman RI

¹⁶ HUMAS MENPANRB, "Provinsi Jabar Tindaklanjuti 89 Persen Aduan Masyarakat", 2020, diakses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 19.41, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/provinsi-jabar-tindaklanjuti-89-persen-aduan-masyarakat>

¹⁷ Laporan Tahunan 2020 Ombudsman RI

Laporan yang diberikan masyarakat dan telah didata oleh SP4N-LAPOR! dan Ombudsman tentu menandakan bahwa terdapat banyak permasalahan dalam aspek pelayanan publik di Jawa Barat. Bila kita melihat skor LPPD Jawa Barat yang selalu berada di peringkat kedua, seharusnya hasil kinerja tersebut ditandai dengan sedikitnya keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik. Namun pada kenyataannya Jawa Barat memiliki lebih banyak laporan dibandingkan dengan Provinsi yang peringkatnya dibawah Jawa Barat dengan status kinerja yang kurang. Padahal seharusnya semakin baik suatu kinerja Pemerintah Daerah maka semakin sedikit pula keluhan atau laporan yang diberikan oleh masyarakat.

Melihat bagaimana EPPD diharapkan dapat meningkatkan reformasi birokrasi dengan kenyataan masih banyaknya permasalahan birokrasi di Jawa Barat, menandakan bahwa EPPD tidak berpengaruh dalam meningkatkan reformasi birokrasi di Jawa Barat karena selama ini terbukti bahwa masalah pelayanan publik masih gagal diatasi dan bahkan terus berkembang. Keberadaan EPPD dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanda tanya akan keberhasilannya dengan melihat bahwa skor EPPD yang tinggi tidak dapat menciptakan perubahan kinerja Pemerintah Daerah dan belum mencapai tujuan dari pelaksanaan EPPD itu sendiri.

Meskipun berdasarkan hasil LPPD Jawa Barat selalu menempati peringkat ke-2, faktanya masih banyak permasalahan dalam lingkup birokrasi atau kinerja. Melihat adanya kesenjangan antara hasil dengan kenyataan yang diperoleh dalam melakukan pelaksanaan EPPD, membutuhkan adanya mekanisme pengukuran hasil kinerja sehingga dapat menilai sejauh mana EPPD dapat mengukur kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Barat. Oleh karena itu untuk dapat melakukan pengukuran keberhasilan EPPD terhadap reformasi birokrasi yang komprehensif dibutuhkan analisis atau penilaian kinerja dari hasil kinerja EPPD di Jawa Barat.

Maka dari itu, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2021”**.

1.3. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan permasalahannya yaitu **“Bagaimana penilaian hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat?”**

1.4. Pertanyaan Penelitian

Agar dapat memudahkan penelitian, rumusan masalah dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan skor atau hasil LPPD?
- b. Bagaimana target dan realisasi kinerja Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat?
- c. Bagaimana capaian kinerja dari indikator kinerja dan urusan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat?

1.5. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya, dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, adalah

- a. Untuk mengetahui kinerja Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil atau skor penilaian LPPD.
- b. Untuk melihat target dan realisasi kinerja pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
- c. Untuk mengetahui capaian kinerja dari indikator kinerja dan urusan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini menghasilkan manfaat yang bersifat ganda dan manfaat tersebut adalah:

- a. Manfaat bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi saran dan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam meningkatkan kinerja Jawa Barat dan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

- b. Manfaat secara teoritis

Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan atau pandangan pembaca serta memperkaya kajian ilmu Administrasi Publik

mengenai manajemen publik atau pengukuran kinerja khususnya dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 akan memaparkan latar belakang masalah, memperjelas permasalahan dalam identifikasi masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selain itu juga bab ini membahas mengenai kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengambilan data, analisis data, uji validitas dan reliabilitas, serta definisi operasional

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 menjelaskan hasil penelitian dan analisis atau pembahasan mengenai evaluasi hasil kinerja EPPD di Jawa Barat

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian.